



Islam and Democracy : Compatibility and Challenges in Muslim-Majority Countries

Nazhwa Rusvianda Ahmad^{1*}, Nazma Nurfadilah Alyudin², Oktaviani Rizqi Wahyuningtyas³, Refnie Afnisa⁴

¹⁻⁴ Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

nazhwarvn@upi.edu^{1*}

Alamat: Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154

Korespondensi penulis: nazhwarvn@upi.edu

Abstract: *The relationship between Islam and democracy has been a complex and often debated topic, particularly in Muslim-majority countries. This research aims to explore the compatibility between Islamic principles and democratic values using Indonesia as a case study. As one of the largest Muslim countries in the world, Indonesia offers a unique context in integrating religious teachings with the modern democratic system. Through qualitative methods that included a Google Form-based survey and a literature review of academic articles and journals, this research found that the majority of respondents (70%) believe that democratic values are in line with Islamic teachings, such as justice, deliberation and equality. However, the research also identified a number of challenges that Indonesia faces in harmonizing the two concepts. The main challenges include differences in the interpretation of Islamic law, difficulties in balancing sharia law with secular law, and the issue of political pluralism. In addition, factors such as intolerance, radicalism and identity politics often become obstacles in creating harmony between religious and democratic values. Despite these obstacles, Indonesia has made significant progress through moderation, strengthening civil society, and successfully managing religious and cultural diversity. Local traditions such as deliberation, gotong royong and pluralism provide a strong foundation for building an inclusive democratic system. This approach is not only relevant for the Indonesian context, but can also serve as a model for other Muslim-majority countries seeking to integrate religion and democracy. This research offers a new contribution to the understanding of the dynamics of the relationship between Islam and democracy, and highlights the importance of civil society strengthening, pluralism education, and the adaptation of religious values in the context of modern democracy. With the results obtained, this research is expected to be a reference for other Muslim countries in creating harmonious and sustainable political governance.*

Keywords: *Islam, democracy, Muslim-majority countries, Indonesia sharia, pluralism, and politics.*

Abstract: Hubungan antara Islam dan demokrasi telah menjadi topik yang kompleks dan sering diperdebatkan, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kompatibilitas antara prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai demokrasi dengan menggunakan Indonesia sebagai studi kasus. Sebagai salah satu negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan konteks yang unik dalam mengintegrasikan ajaran agama dengan sistem demokrasi modern. Melalui metode kualitatif yang mencakup survei berbasis Google Form dan kajian literatur dari artikel serta jurnal akademik, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas responden (70%) percaya bahwa nilai-nilai demokrasi sejalan dengan ajaran Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan kesetaraan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyelaraskan kedua konsep tersebut. Tantangan utama meliputi perbedaan interpretasi hukum Islam, kesulitan dalam menyeimbangkan hukum syariah dengan hukum sekuler, serta isu pluralisme politik. Selain itu, faktor-faktor seperti intoleransi, radikalisme, dan politik identitas sering kali menjadi penghambat dalam menciptakan harmoni antara nilai-nilai agama dan demokrasi. Meskipun menghadapi banyak kendala, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui pendekatan moderasi, penguatan masyarakat sipil, dan keberhasilan dalam mengelola keragaman agama dan budaya. Tradisi lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan pluralisme menjadi landasan yang kuat dalam membangun sistem demokrasi yang inklusif. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk konteks Indonesia, tetapi juga dapat menjadi model bagi negara-negara mayoritas Muslim lainnya yang berupaya mengintegrasikan agama dan demokrasi. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam pemahaman mengenai dinamika hubungan antara Islam dan demokrasi, serta menyoroti pentingnya penguatan masyarakat sipil, pendidikan pluralisme, dan adaptasi nilai-nilai agama dalam konteks demokrasi modern. Dengan hasil yang diperoleh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi negara-negara Muslim lainnya dalam menciptakan tata kelola politik yang harmonis dan berkelanjutan.

Keywords: Islam, demokrasi, negara mayoritas muslim, Indonesia syariah, pluralisme, dan politik.

1. LATAR BELAKANG

Islam dan demokrasi adalah dua konsep besar yang sering menjadi perdebatan, terutama di negara-negara mayoritas Muslim. Demokrasi modern, yang menekankan pada kebebasan individu, partisipasi politik, dan pluralisme, kadang dianggap berbenturan dengan interpretasi nilai-nilai Islam yang konservatif. Namun, di sisi lain, nilai-nilai Islam seperti keadilan, persamaan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial justru memiliki banyak kesamaan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara filosofis, Islam dan demokrasi memiliki ruang untuk saling melengkapi. Perdebatan muncul lebih karena faktor interpretasi dan implementasi di tingkat praktis, yang sangat dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan kondisi sosial-politik di setiap negara.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, menghadirkan kasus yang menarik dalam kaitannya dengan integrasi Islam dan demokrasi. Sejak era Reformasi, Indonesia telah mengalami transformasi politik yang signifikan, menjadikan demokrasi sebagai sistem politik utama. Namun, perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Isu seperti radikalisme, intoleransi, dan politik identitas sering kali menjadi penghalang dalam menciptakan harmoni antara nilai-nilai Islam dan prinsip demokrasi. Selain itu, faktor pluralisme agama dan budaya di Indonesia juga memberikan dinamika tersendiri yang tidak ditemukan di banyak negara Muslim lainnya.

Statistik menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mendukung prinsip demokrasi, dengan sekitar 70% responden dalam survei menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi sejalan dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, 25% responden menyoroti adanya tantangan dalam implementasi, terutama terkait perbedaan interpretasi hukum Islam dan keseimbangan antara syariah dan hukum sekuler. Data ini mencerminkan dukungan yang besar terhadap integrasi Islam dan demokrasi, tetapi sekaligus menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural maupun kultural yang ada.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengeksplorasi kompatibilitas antara Islam dan demokrasi, khususnya dalam konteks Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kajian ini tidak hanya membahas tantangan-tantangan yang ada, tetapi juga menyoroti bagaimana pendekatan moderasi, tradisi lokal seperti musyawarah, dan penguatan masyarakat sipil dapat menjadi solusi untuk menciptakan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih jauh, penelitian ini juga menyoroti bagaimana pengalaman Indonesia dapat memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara Muslim lainnya yang sedang berusaha mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam tata kelola demokrasi modern.

Urgensi penelitian ini sangat relevan di tengah meningkatnya tantangan global seperti radikalisme agama, intoleransi, dan polarisasi politik berbasis identitas. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki peran strategis sebagai contoh negara Muslim yang berhasil mengelola pluralisme dan demokrasi tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan kebijakan dan pendekatan baru dalam membangun sistem politik yang harmonis antara Islam dan demokrasi, baik di Indonesia maupun di negara-negara Muslim lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kompatibilitas antara Islam dan demokrasi di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan kedua konsep tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah pada persepsi, pengalaman, dan pandangan subjektif responden terkait hubungan antara Islam dan demokrasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman lebih luas mengenai dinamika sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks Islam di Indonesia.

Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua metode utama: survei dan kajian literatur. Survei dilakukan untuk mendapatkan pandangan langsung dari masyarakat tentang seberapa besar kesesuaian antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi, serta tantangan yang mereka anggap relevan dalam menerapkan kedua konsep ini. Survei menggunakan instrumen berbasis *Google Form* yang disebarakan kepada responden di berbagai daerah di Indonesia, yang mencakup berbagai latar belakang sosial, agama, dan politik. Responden terdiri dari berbagai kelompok usia, tingkat pendidikan, dan status sosial yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pandangan masyarakat Indonesia secara umum.

Survei ini dirancang untuk mengidentifikasi seberapa besar dukungan terhadap penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks Islam, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi tersebut, seperti perbedaan interpretasi hukum Islam, masalah pluralisme politik, dan interaksi antara hukum syariah dan hukum sekuler. Instrumen survei mencakup pertanyaan tertutup dan terbuka untuk memungkinkan responden memberikan jawaban yang lebih mendalam dan menjelaskan alasan mereka. Dengan metode ini, peneliti berharap bisa mendapatkan data kuantitatif yang kuat serta wawasan kualitatif yang berguna dalam memahami perspektif masyarakat terhadap hubungan Islam dan demokrasi.

Selain survei, penelitian ini juga melibatkan kajian literatur yang komprehensif dari berbagai artikel, jurnal akademik, buku, dan dokumen resmi terkait dengan hubungan Islam dan demokrasi, serta konteks sosial-politik Indonesia. Kajian literatur ini digunakan untuk mendalami teori-teori yang relevan, serta untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman dan pelajaran yang dapat diambil dari negara-negara mayoritas Muslim lainnya dalam mengintegrasikan Islam dan demokrasi. Kajian ini tidak hanya berfokus pada literatur tentang Indonesia, tetapi juga memperluas kajian pada teori demokrasi dalam konteks Islam, sejarah perkembangan demokrasi di negara-negara Muslim, serta tantangan yang dihadapi oleh negara-negara tersebut dalam menjalankan sistem politik yang inklusif dan demokratis.

Data yang diperoleh dari survei dan kajian literatur kemudian dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data survei dan literatur, seperti kompatibilitas antara prinsip-prinsip Islam dan demokrasi, tantangan dalam implementasi hukum syariah, serta peran masyarakat sipil dalam memperkuat demokrasi. Setelah itu, tema-tema ini dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul, serta untuk menggali hubungan antara berbagai faktor yang memengaruhi implementasi demokrasi di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun pemahaman yang lebih sistematis dan mendalam mengenai hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari survei dengan literatur yang ada, serta dengan melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi politik yang memiliki wawasan mendalam mengenai topik ini. Pendekatan triangulasi ini memberikan keakuratan dan kredibilitas yang lebih tinggi terhadap temuan penelitian.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk menggali pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai integrasi Islam dan demokrasi di Indonesia, serta untuk memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan dan strategi untuk memperkuat demokrasi yang inklusif di negara-negara mayoritas Muslim. Dengan kombinasi survei, kajian literatur, dan analisis tematik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur tentang hubungan antara agama dan demokrasi, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi negara-negara yang berusaha mengintegrasikan kedua konsep tersebut.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandangan Terhadap Hubungan Islam dan Demokrasi:

Mayoritas responden (70%) menganggap bahwa prinsip-prinsip demokrasi sejalan dengan ajaran Islam. Namun, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan keduanya, seperti perbedaan interpretasi ajaran Islam (25%) dan masalah keseimbangan antara hukum syariah dan hukum sekuler (20%).

Tingkat kompatibilitas antara nilai-nilai Islam dan demokrasi di Indonesia

Tingkat kompatibilitas antara nilai-nilai Islam dan demokrasi di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek penting. Dalam konteks ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa elemen kunci yang menunjukkan hubungan antara kedua konsep tersebut.

Demokrasi dalam Islam

Konsep syura (musyawarah) dalam Islam sangat mirip dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Syura mengedepankan dialog dan musyawarah sebagai cara untuk mencapai konsensus, yang sejalan dengan praktik demokrasi yang menekankan keterlibatan publik dalam proses politik. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun demokrasi tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, banyak prinsip demokrasi dapat ditemukan dalam ajaran Islam, seperti kesetaraan, kerja sama, dan praktik baik (taghyir) yang mendasari interaksi sosial dan politik di Indonesia (Shadiq et al. 2024).

Selain itu, banyak Muslim di Indonesia mendukung penerapan demokrasi, meskipun terdapat variasi pandangan mengenai bagaimana demokrasi seharusnya diterapkan dalam konteks nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk integrasi antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi, meskipun tantangan tetap ada dalam implementasinya (Nurjaman, A., 2023).

Pluralisme & Keragaman

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman agama dan budaya. Pluralisme Islam dapat berfungsi sebagai landasan untuk mendukung demokrasi dengan mempromosikan toleransi dan saling menghormati antar kelompok. Namun, tantangan muncul dari interpretasi agama yang kaku serta lemahnya penegakan hukum yang sering kali menghambat upaya untuk menciptakan masyarakat yang inklusif (Nur'Aini et al. 2023).

KH Abdurrahman Wahid, seorang tokoh penting dalam pemikiran pluralisme di Indonesia, menekankan pentingnya menghargai perbedaan antaragama dan mendorong dialog antarbudaya sebagai cara untuk mencapai kedamaian dan harmoni sosial. Pendekatannya

terhadap pluralisme berkontribusi pada pengembangan masyarakat sipil yang lebih kuat dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi (Aspinall, E., & Mietzner, M., 2019).

Hukum Islam dan Politik

Hukum Islam memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem hukum nasional di Indonesia. Interaksi antara hukum Islam dan hukum negara menciptakan dinamika yang kompleks, di mana kedua sistem saling mempengaruhi satu sama lain. Tantangan utama adalah menyeimbangkan penerapan hukum Islam dengan prinsip-prinsip pluralisme yang mendasari masyarakat Indonesia (Ramadhan, S., 2020).

Sejak era Reformasi, terdapat upaya untuk mereformasi hukum Islam agar lebih sesuai dengan konteks sosial dan politik saat ini. Proses legislasi hukum Islam di Indonesia mencerminkan perubahan politik yang terjadi dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai dasarnya (Kazhimi et al. 2024).

Peran Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil memainkan peran krusial dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Konsep masyarakat madani atau masyarakat sipil yang beretika idealnya menggambarkan hubungan antara nilai-nilai moral Islam dan fungsi negara dalam mengelola kehidupan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk polarisasi sosial dan tekanan dari kelompok-kelompok konservatif (Abduloh et al. 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan besar bagi masyarakat sipil untuk bertahan dalam iklim politik yang semakin menekan, ada banyak contoh keberhasilan aktivisme sosial yang berhasil mempertahankan hak asasi manusia dan mendorong akuntabilitas politik (Hannani, 2023). Oleh karena itu, penguatan masyarakat sipil menjadi kunci untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokratis tetap terjaga dalam konteks keberagaman budaya dan agama di Indonesia.

Tantangan Utama:

Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam menyelaraskan Islam dan demokrasi, termasuk radikalisme, intoleransi, dan politik identitas yang memanfaatkan sentimen agama untuk kepentingan politik. Regulasi penistaan agama juga dinilai dapat memperlemah demokrasi karena membatasi kebebasan berekspresi.

Faktor Sejarah, Budaya, dan Politik:

Faktor sejarah dan budaya, seperti tradisi demokrasi desa yang kolektivistis, berperan besar dalam membentuk demokrasi di Indonesia. Konsep musyawarah dan gotong royong

mendorong partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya menjadi bagian integral dari proses demokrasi.

Peran Tokoh Agama:

Peran tokoh agama sangat krusial dalam proses demokrasi, terutama dalam pendidikan politik dan moral serta mobilisasi partisipasi politik. Masyarakat sipil juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan demokrasi sekuler.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan berdampingan meskipun menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, telah membuktikan bahwa nilai-nilai Islam, seperti keadilan, persamaan, dan musyawarah, memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Mayoritas responden dalam penelitian ini mendukung pandangan tersebut, dengan 70% meyakini bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, meskipun terdapat keselarasan prinsip, penerapan nilai-nilai ini dalam konteks sosial-politik Indonesia masih menghadapi kendala.

Tantangan utama dalam integrasi Islam dan demokrasi di Indonesia meliputi perbedaan interpretasi hukum Islam, ketidakseimbangan antara syariah dan hukum sekuler, serta isu pluralisme politik. Selain itu, fenomena intoleransi, radikalisme, dan politik identitas yang memanfaatkan sentimen agama untuk kepentingan politik menjadi hambatan besar dalam menciptakan harmoni antara kedua konsep ini. Regulasi seperti penistaan agama juga sering dianggap melemahkan demokrasi karena membatasi kebebasan berekspresi.

Meskipun demikian, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun demokrasi yang inklusif melalui pendekatan moderasi, penguatan masyarakat sipil, dan pengelolaan keragaman agama serta budaya. Tradisi lokal, seperti musyawarah dan gotong royong, menjadi landasan kuat dalam menciptakan sistem politik yang demokratis dan berakar pada nilai-nilai keagamaan. Upaya reformasi hukum Islam untuk menyesuaikan dengan konteks sosial-politik modern juga menunjukkan fleksibilitas dalam menerapkan nilai-nilai agama tanpa mengorbankan esensi demokrasi.

Keberhasilan Indonesia dalam menyelaraskan Islam dan demokrasi memberikan pelajaran penting bagi negara-negara Muslim lainnya. Pendekatan yang menekankan pluralisme, dialog antaragama, dan moderasi dapat menjadi model untuk mengatasi tantangan serupa di negara lain. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai agama tidak harus bertentangan dengan demokrasi, asalkan diterapkan secara inklusif dan kontekstual.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika hubungan antara Islam dan demokrasi, serta pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam sistem demokrasi modern tanpa menimbulkan konflik. Dalam menghadapi tantangan global seperti radikalisme dan polarisasi politik, pengalaman Indonesia dapat menjadi inspirasi bagi upaya menciptakan tata kelola politik yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Dengan penguatan masyarakat sipil, pendidikan pluralisme, serta adaptasi hukum Islam yang relevan, Indonesia berpotensi menjadi model keberhasilan integrasi Islam dan demokrasi yang dapat diterapkan di negara-negara mayoritas Muslim lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduloh, A. Y. ., Ruswandi, U. ., Erihadiana, M. ., Mutmainah, N. ., & Ahyani, H. . (2022). The Urgency Of Multicultural Islamic Education, Democracy And Human Rights In Indonesia. *Indonesian Journal Of Interdisciplinary Islamic Studies (Ijiis)*, 5(2), 21–43. <https://doi.org/10.20885/Ijiis.Vol.5.Iss2.Art2>
- Anam, H. F. (2019). Politik Identitas Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 2(2), 181-188. <https://doi.org/10.21043/Politea.V2i2.5953>
- Anam, Haikal Fadhil. (2019). Politik Identitas Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism In Indonesia. *Journal Of Democracy* 30(4), 104-118. <https://dx.doi.org/10.1353/Jod.2019.0055>
- Benar News. (2020, October 20). Islam And The Challenges Of Democracy In Indonesia [Indonesia]. Benar News. Retrieved From <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/islam-demokrasi-10202017141251.html>.
- Global Centre For Pluralism. (2023). Indonesia Monitor Report. Monitor Pluralism. <https://monitor.pluralism.ca/publication/indonesia-monitor-report/>
- Hannani. (2023). Revisiting Islamic Law In Indonesia's Legal System Discourse: A Critical Analysis Of The Legal And Social Implications. *International Journal Of Law And Politics Studies*, 5(3), 13-17. <https://doi.org/10.32996/Ijpls.2023.5.3.3>
- Jalil, A. (2020). Kompatibilitas Islam Dan Demokrasi: Tantangan Dan Hambatan Demokratisasi Di Dunia Islam. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 8(1), 430-434. <https://doi.org/10.36052/Andragogi.V8i1.121>
- Kajian Literatur Dan Artikel Terkait Demokrasi Di Negara-Negara Muslim Mayoritas.
- [Kazhimi, A. B., Siswanto, M., & Muizudin, M. \(2024\). Islam And Civil Society: A Study Of Azyumardi Azra's Thoughts In Building A Cultural Movement In Indonesia. Journal](#)

[Of Islamic Thought And Philosophy, 3\(1\), 137–152.](#)
<https://doi.org/10.15642/jitp.2024.3.1.137-152>

- Mundakir, A. (2023). Peran Masyarakat Sipil Dalam Penguatan Demokrasi Politik Islam Di Indonesia. *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(1), 61-77. Doi: <http://dx.doi.org/10.21043/cdjpmi.v7i1.20847>
- Noviani. (2023). Tantangan Dan Hambatan Demokrasi Di Dunia Islam. Iain Pontianak
- Nur'Aini, K. N., Nurhuda, A., & Huda, A. A. S. B. (2023). Pluralism In The Perspective Of Kh Abdurrahman Wahid: An Introduction To Multicultural Education. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 230-238. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i2.2203>
- Nurjaman, A. (2023). Islamic Movements And The Future Of Democracy In Post-Suharto Indonesia Era. *Hayula: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, 7(1), 33–50. <https://doi.org/10.21009/hayula.007.01.03>
- Nurrohman. (2015). Hukum Islam Di Era Demokrasi: Tantangan Dan Peluang Bagi Formalisasi Politik Syari'at Islam Di Indonesia. *Addin: Media Dialektika Ilmu Islam*, 9(1), 161-170. <https://doi.org/10.21043/addin.v9i1.611>
- Parmudi, M. (2014). Islam Dan Demokrasi Di Indonesia: Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam. Iain Walisongo Semarang.
- Ramadhan, S. (2020). Islamic Law, Politics And Legislation: Development Of Islamic Law Reform In Political Legislation Of Indonesia. *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35>
- Religion And Global Society. (2024, February 20). Faith, Democracy, And Politics In Indonesia: Explaining The Lack Of Islamic Mobilisation In 2024. Lse Blogs. <https://blogs.lse.ac.uk/religionglobalsociety/2024/02/faith-democracy-and-politics-in-indonesia-explaining-the-lack-of-islamic-mobilisation-in-2024/>
- Shadiq, G. M., Hasan, A., Umar, M., & Khasyi'in, N. (2024). Pergerakan Islam Dan Demokrasi Di Indonesia. *Interdisciplinary Explorations In Research Journal*, 2(2), 865-877. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.578>.
- Solihin, S. (2022). Islam Dan Demokrasi: Prespektif Cendekiawan Muslim Dan Penerapan Di Indonesia. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 93–98. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v2i1.8>.
- Sukmajati, E. (2023, March 30). Indonesia's Democratization Underpinned By Major Islamic Groups And Consensus On National Ideology. Middle East Institute. <https://www.mei.edu/publications/indonesias-democratization-underpinned>
- Survei Lapangan Menggunakan Google Form Untuk Mengumpulkan Data Pandangan Responden Terkait Islam Dan Demokrasi.
- Syarif, N. (2015). Islam Dan Kemajemukan Di Indonesia (Upaya Menjadikan Nilai-Nilai Yang Menjunjung Tinggi Kemajemukan Dalam Islam Sebagai Kekuatan Positif Bagi Perkembangan Demokrasi). *Asy-Syari'ah*, 18(2), 227-234. Doi: <https://doi.org/10.15575/as.v18i2.662>.

- Tadjoeddin, M. Z. (2022, October 19). Islamic Civil Society's Enduring Vitality In Indonesia's Democracy. Lowy Institute. <https://www.Lowyinstitute.Org/The-Interpreter/Islamic-Civil-Society-S-Enduring-Vitality-Indonesia-S-Democracy>
- Tanjung, I., & Yamamah, A. (2023). Hukum Islam Dan Politik: Pengaruhnya Terhadap Struktur Sosial Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 8(2), 44-51. Doi: <https://doi.org/10.54248/Alhadi.V8i2.4620>.
- Wahid, A. (2022). Islam, Democracy, And Pluralism In Indonesia: The Role Of Civil Society. In C. M. Lee & R. D. B. Wong (Eds.), *The Oxford Handbook Of Islam And Politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/Oxfordhb/9780195067664.013.0008>.